

**KARAKTERISTIK PETERNAK SAPI POTONG YANG MENGIKUTI SISTEM
BAGI HASIL DENGAN PERGURUAN TINGGI (UNIVERSITAS HASANUDDIN)**

Sitti Nurani Sirajuddin¹, Hastang¹, Veronica Sri Lestari¹, Rosmawaty²

1) Fakultas Peternakan, Universitas Hasanuddin Makassar

Email : sitti.nurani@unhas.ac.id

hastang_uh@yahoo.co.id

veronicasrilestari@unhas.ac.id

2) Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin Makassar

Email: rosmawaty_57@yahoo.co.id

Abstract

The profit sharing system in the livestock business is part of the partnership pattern aimed at improving the welfare of the farmers. The purpose of this research is to know the characteristics of the beef cattle farmers who follow the profit sharing system with the universities of UNHAS that is with Maiwa Breeding Center (MBC) located in Enrekang district, South Sulawesi Province. Population is all breeders who follow the sharing system with MBC. The sample is a beef cattle rancher who has a profit sharing system with MBC and is located in Maiwa Subdistrict, Enrekang Regency amounting to 44 farmers. Research is descriptive. Data source is primary data and secondary data. Data type is qualitative data and quantitative data. The results showed that the age of the farmers who followed the system were in the productive age (95%), the majority of men (95%), the last level of education, most of them were junior high school (45.5%), the number of family dependents on the scale of 5-6 people 47.7%.

Keywords: *profit sharing system, farmers, college, characteristics, partnership*

PENDAHULUAN

Rencana pembangunan yang ditetapkan pemerintah dibidang pertanian yaitu pembangunan pertanian yang maju, efisien dan tangguh dengan sistem agribisnis yang terpadu. Subsektor peternakan sebagai bagian integral dari sector pertanian mempunyai peran sangat penting dalam pembangunan bangsa yang bertujuan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat peternak. Pendapatan dan taraf hidup yang meningkat akan menyebabkan permintaan akan produk peternakan semakin meningkat pula. Peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat yang semakin tinggi akan pemenuhan gizi keluarga, terutama daging dan hasil olahannya telah membuka peluang bisnis yang besar bagi pengembangan peternakan sapi potong di Indonesia. Secara umum, peningkatan permintaan daging dan hasil olahannya tidak dibarengi oleh peningkatan jumlah populasi sapi potong itu sendiri, sehingga produksi daging di dalam negeri tidak mampu memenuhi permintaan tersebut yang mengakibatkan pemerintah melakukan impor.

Komoditas sapi potong merupakan ternak penghasil daging di Indonesia. Namun, produksi daging sapi dalam negeri belum mampu memenuhi kebutuhan karena populasi dan tingkat produktivitas ternak rendah (Isbandi; 2004; Direktorat Jenderal Peternakan 2007; Syadzali 2007; Sumanto 2013). Rendahnya populasi sapi potong antara lain disebabkan sebahagian besar

ternak dipelihara oleh peternak berskala kecil dengan lahan dan modal terbatas (Kariyasa 2005; Mersyah 2005; Suwandi 2005). Modal merupakan faktor pembatas. Pada saat ini tingkat kepemilikan ternak dalam usaha relatif kecil yaitu sapi 1-3 ekor, kambing/domba 3-5 ekor dan unggas 5-20 ekor. Pendapatan kotor petani peternak masih belum cukup memenuhi kebutuhan hidup petani dan keluarganya. Usaha ternak merupakan sumber tambahan pendapatan yang penting untuk menopang kebutuhan keluarga tani khususnya di pedesaan (Kusnadi, 2008). Pola usahanya sebahagian besar adalah perbibitan dan pembesaran anak dan hanya sebahagian kecil peternak yang mengkhususkan pada usaha penggemukan. Oleh karena itu diperlukan pengelolaan usaha dengan pola kemitraan sehingga dapat memberikan keuntungan yang layak secara berkelanjutan (Sirajuddin, dkk. 2015)

Pola kemitraan atau kerjasama dalam suatu usaha sudah ada dimasyarakat petani/peternak sejak dahulu di Propinsi Sulawesi Selatan. Pola kemitraan tersebut dikenal dengan Tesang yang berasal dari bahasa Bugis yaitu Teseng yang menerapkan sistem bagi hasil antara peternak dan pemilik modal dengan tidak berdasarkan kontrak akan tetapi kepercayaan (trust) yang lebih kuat terjalin.

Momentum kerjasama usaha dengan sistem kemitraan menjadi pilihan utama saat ini. Kerjasama usaha dengan sistem kemitraan diwujudkan dalam kontrak yang mengikat para pihak yang bersepakat. Kontrak tersebut mengandung sejumlah klausula yang harus dipatuhi oleh para pihak, namun tetap harus memperhatikan sejumlah etika dan regulasi yang berlaku. Kontrak yang dilakukan harus mempertimbangkan prinsip kesetaraan dan keseimbangan sehingga harus menguntungkan para pihak. Kontrak yang dilakukan tidak pula melanggar prinsip persaingan usaha sehat dan tidak menimbulkan praktek monopoli (Sirajuddin, dkk., 2012).

Salah satu daerah yang memiliki padang penggembalaan atau ranch yang dikelola Universitas Hasanuddin yaitu di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dengan nama *Maiwa Breeding Centre* (MBC) yang memiliki tujuan sebagai pusat pengembangan industri sapi lokal yang berbasis IPTEK. Dengan luas 250 Ha dijadikan sebagai pusat pembibitan sapi

Polled dengan populasi sapi mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 sebanyak 258 ekor dan pada tahun 2017 berjumlah 485 ekor. Disamping itu pada pengelolaan MBC juga melakukan program pemberdayaan pada masyarakat di sekitar MBC terutama di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang dari berjumlah 17 orang dan sekarang berjumlah kurang lebih 44 orang. Dengan hal tersebut maka perguruan tinggi utamanya Universitas Hasanuddin melakukan kegiatan pemberdayaan melalui Maiwa Breeding Centre dengan bermitra peternak sapi melalui sistem bagihasil dengan kontrak yang dilaksanakan antara kedua belah pihak. Dengan diterapkannya sistem bagihasil diharapkan MBC mampu menjadi unit bisnis para kelompok tani ternak mitra disekitarnya serta mendukung ketersediaan sapi bibit guna mewujudkan swasembada daging di Propinsi Sulawesi Selatan dan di Indonesia pada umumnya. Menurut Sirajuddin(2014)

sistem bagihasil adalah sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut dijanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih, istilah ini biasa disebut teseng/Tesang di Propinsi Sulawesi Selatan. Dengan sistem bagi hasil yang dilakukan antara pihak MBC dan peternak sapi potong maka perlu mengetahui karakteristik peternak yang mengikuti sistem bagihasil dan bentuk bagihasil itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret 2018. Penelitian dilakukan di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang. Adapun pemilihan lokasi karena merupakan lokasi penerapan sistem bagihasil antara MBC dan peternak sapi potong. Jenis penelitian adalah kuantitatif deskriptif. Populasi adalah semua peternak sapi potong yang mengikuti sistem bagihasil dengan MBC dan sampel adalah peternak sapi potong yang mengikuti sistem bagihasil dengan MBC berjumlah 44 orang. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yaitu dengan observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan yaitu statistik deskriptif dengan distribusi frekuensi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Peternak

Karakteristik peternak sangat mempengaruhi dalam pengelolaan usaha peternakan yaitu umur, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga, skala usaha dan lama beternak (Sirajuddin et al, 2016). Adapun karakteristik peternak yang mengikuti sistem bagi hasil dengan MBC yaitu dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel. 1. Karakteristik peternak sapi potong yang mengikuti sistem bagi hasil dengan MBC di Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang

Karakteristik	Uraian	Jumlah	Persentase
Umur	0-14	0	0
	15-64	40	95
	65	4	5
Tingkat Pendidikan	SMA	5	11,4
	SMP	20	45,5
	SD	17	38,6
	Tidak sekolah	2	4,5
Jenis Kelamin	Laki-laki	38	95
	Perempuan	6	5
Jumlah anggota keluarga	1-2	8	18,2
	3-4	15	34,1
	5-6	21	47,7

Sumber : Data Primer 2018

Tabel 1 menunjukkan peternak sapi potong yang mengikuti sistem bagi hasil berada pada usia produktif (15-64 tahun) yang berarti peternak sapi potong mempunyai kemampuan fisik dalam mengelola usaha sapi potong, hal ini sesuai dengan pendapat Jeremias, dkk (2017) bahwa umur peternak memiliki pengaruh yang cukup kuat terutama berkaitan dengan kemampuan menyediakan pakan bagi ternak yang diambil dari kebun hijauan makanan ternak yang jaraknya umumnya relative cukup jauh dengan lokasi pemeliharaan atau kandang kelompok, sejalan juga dengan pendapat Murwanto (2008) bahwa peternak yang berumur produktif biasanya memiliki pola pikir yang dinamis dan kemampuan fisik yang prima dalam mengelola usahanya. Semakin muda umur seseorang maka semakin cepat menerima perubahan dari luar karena petani peternak selalu ingin mencoba sesuatu yang baru sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam diversifikasi usahanya.

Untuk pendidikan pada peternak sapi potong yang mengikuti sistem kemitraan sistem bagihasil sebahagian besar pada tingkat menengah pertama (45,4 %), hal ini menunjukkan bahwa peternak sapi potong sistem bagihasil sudah memahami keuntungan dalam mengikuti system bagihasil dengan MBC. Tingkat pendidikan seseorang akan mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap sesuatu. Semakin tinggi pendidikan seseorang akan menyebabkan semakin maju cara pandang seseorang terhadap sesuatu, termasuk dalam usaha sapi potong sistem bagihasil, hal ini sesuai dengan pendapat Mubyarto (1986) bahwa tingkat pendidikan peternak akan mempengaruhi pola berpikir, kemampuan belajar dan taraf intelektual. Dengan pendidikan formal maupun informal maka peternak akan memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas sehingga lebih mudah merespon suatu inovasi yang menguntungkan bagi usahanya. Sejalan juga dengan pendapat Mahmud (2014) bahwa dengan pendidikan formal maupun informal maka peternak akan memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas sehingga akan lebih mudah merespon suatu inovasi yang menguntungkan bagi usahanya.

Untuk jumlah anggota keluarga menunjukkan jumlah 5-6 orang merupakan jumlah tertinggi (47, 7 %). Jumlah anggota keluarga mempengaruhi dalam mengelola suatu usaha, hal ini sejalan dengan pendapat Sobait et al (2011) bahwa jumlah anggota keluarga peternak dapat mempengaruhi aktivitas usaha peternak karena jumlah anggota keluarga dapat mensuplai ketersediaan tenaga kerja yang dapat membantu kegiatannya dan jika semakin besar jumlah anggota keluarga maka semakin besar kebutuhan keluarga yang harus dipenuhi.

Sistem Bagi hasil *Maiwa Breeding Centre* (MBC)

Secara umum pengertian bagihasil yaitu suatu system dimana pihak pemilik modal menyerahkan modalnya pada orang lain dan masing-masing pihak mengharapkan hasil tambah. Sistem bagi hasil ini dikerjakan mulai dari proses pra produksi, produksi hingga pemasaran yang saling membutuhkan dan menguntungkan antara pemilik modal dan peternak itu sendiri. Mekanisme ini telah terbukti dikalangan peternak yang kurang modal sangat membantu karena dapat menopang kebutuhan ekonomi keluarga tanpa harus keluar modal usaha yang besar (Sanjaya dan Sudarwati, 2015). Pada prinsip system bagi hasil dalam peternakan sapi tidak lepas dari modal komunitas yang berada di lingkungan tersebut. Hasbullah (2006) menyatakan bahwa konsep pembangunan harus memiliki modal komunitas didalamnya terdiri dari ; (a) modal manusia (human capital) berupa kemampuan personal

seperti pendidikan, pengetahuan, kesehatan, keahlian dan keadaan terkait lainnya; (b) modal sumberdaya alam (*natural capital*) seperti perairan laut; (c) modal ekonomi produktif (*produced economic capital*) berupa aset ekonomi dan finansial serta aset lainnya, dan (d) modal social (*social capital*) berupa norma/nilai, kepercayaan (*trust*) dan partisipasi dalam jaringan.

Dalam system bagihasil terdapat beberapa teori yang dapat menjadi landasan dalam penerapannya yaitu :

a) Modal Sosial

Merupakan gambaran organisasi sosial sebagai jaringan-jaringan, norma-norma dan kepercayaan yang dapat berkoordinasi dan bekerjasama dalam mencapai suatu keuntungan bersama seperti yang dilakukan dalam usaha peternakan sapi. Modal sosial merupakan suatu dimensi budaya dari kehidupan ekonomi yang sangat menentukan dalam keberhasilan suatu bidang ekonomi masyarakat lemah. Konsep modal sosial menjadi salah satu komponen penting untuk menunjang model pembangunan manusia. Karena dalam modal ini, manusia ditempatkan sebagai subjek penting yang menentukan arah penyelenggaraan pembangunan (Fukuyama, 1995). Analisis modal sosial dapat mengacu pada komponen-komponen modal sosial antara lain komponen mekanisme kultural, saling percaya, pranata dan norma-norma yang dimiliki bersama dan jaringan sosial yang ada. Sehingga dalam system bagihasil sapi kebanyakan pemilik sapi dan pemelihara sapi adalah kerabat dekta, keluarga dan tetangga yang memiliki tingkat modal sosial yang lebih dalam dan lebih mebgikat antara satu dengan lainnya. Penerapan modal sosial berupa kepercayaan dalam system bagihasil memunculkan suatu kejujuran diantara kedua belah pihak yang selalu dijunjung tinggi oleh para penggaduh sapi. Sehingga dengan adanya kejujuran kedua belah pihak tidak ada yang menggunakan perjanjian secara tertulis yang dilandaskan pada hukum yang kuat. Selain itu, dengan adanya kepercayaan juga menimbulkan sifat jiwa rasa, adanya sikap senang berlaku rukun, adanya sifta saling menghormati orang lain, adanya kejujuran yang terbentuk di antara pemilik ternak dan pemelihara ternak setiap menjalankan suatu usaha. Adapun dengan adanya jaringan sosial atau adanya kedekatan secara emosional antar warga masyarakat seperti teman dekat, saudara, tetangga yang merupakan jaringan sosial juga dapat menimbulkan hubungan antar warga desa yang semakin erat dalam bekerja sama. Untuk meningkatkan

pendapatan ekonomi keluarga yang mewujudkan melalui hubungan kerja sama dalam system bagihasil sapi. Munculnya jaringan sosial juga menimbulkan rasa empati yang tinggi terhadap kedekatan yang ditimbulkan ketika melihat saudara, tetangga dan kerabat dekatnya mengalami kondisi ekonomi yang kurang baik. Maka muncullah inisiatif untuk memberikan bantuan berupa ternak sapi yang diamanahkan kepada rekannya dengan perjanjian hasil usaha dibagi dua antara pemilik dan peternak sapi. Tujuan diberikannya bantuan tersebut kepada kerabat dekat atau saudaranya agar bisa membantu dalam meningkatkan pendapatn ekonomi keluarga yang dilandaskan pada motif tolong-menolong dan saling bekerja sama (Sanjaya dan Sudarwati, 2015)

b) Interaksi sosial

Apabila dalam masyarakat terjadi kontak sosial dalam suatu komunitas. Interaksi terjadi dua orang atau kelompok saling bertanya atau pertemuan secara individu dengan kelompok dimana komunitas terjadi diantara kedua belah pihak. Interkasi sosial dimaksud sebagai pengaruh timbal balik antara individu dengan golongan didalam usaha mereka untuk memecahkan persoalan yang dihadapinya dalam usaha untuk mencapai tujuannya (Ahmadi, 2007).

c) Kerjasama

Merupakan usaha bersama antara individu atau kelompok untuk mencapai satu tujuan bersama. Proses terjadinya kerjasama lahir apabila antara individu dan kelompok yang bertujian memiliki satu tujuan yang sama yang ingin mereka capai. Begitupula apabila individu suatu kelompok merasa adanya ancaman dan bahaya dari luar, maka proses kerjasama ini akan bertambah kuat diantara mereka.

Pada undang-undang Peternakan tahun 1967 pasal 17 tentang bagihasil Ternak dan Persewaan ternak, berisikan ayat (1) peternak atas dasar bagihasil ialah penyerahan ternak sebagai amanat yang dititipkan kepada orang lain untuk dipelihara baik-baik, ditenakkan dengan perjanjian bahwa dalam waktu tertentu titipan tersebut dibayar kembali berupa ternak keturunannya atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak, ayat (2) waktu tertentu yang dimaksud pada ayat (1) tidak boleh kurang dari 5 (lima) tahun jika ternak atas dasar bagihasil tersebut termasuk ternak besar tetapi untuk ternak kecil jangka waktu itu dapat diperpendek (Sirajuddin et al, 2014). System dimana dilakukan perjanjian atau ikatan bersama didalam melakukan kegiatan usaha disebut sistem bagihasil. Dalam perjanjian tersebut dijanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak dan biasanya di Propinsi Sulawesi Selatan bentuk perjanjian cenderung variatif

(Sirajuddin dkk, 2016; Nono, 2011). Sementara penerapan sistem bagihasil oleh pengelola MBC dan peternak sapi potong yaitu :

Dalam menentukan sistem pembelian sapi sebelum memulai sistem bagihasil maka pihak MBC dan peternak membuat kesepakatan bersama berapa harga sapi yang akan dipelihara setelah tercapai kesepakatan maka modal awal telah ditentukan, hal ini sesuai dengan pendapat Scheltema (1986) bahwa system bagihasil menunjukkan hubungan antara pemilik atau orang yang memiliki asset (tanah,ternak,tanaman dan lain-lain) dengan pengarap atau penggaduh. Hubungan kerjasama ini sangat beragam coraknya,khususnya pada bagohasil tradisional, dimana sangat tergantung pada kesepakatan atau perjanjian keua belahpihak. Perjanjian-perjanjian dengan pembagian keuntungan dalam bagihasil usaha ternak dapat dibagi sebagai berikut;perjanjian dengan penyerahan ternakkepada seseorang untuk dipelihara selama waktu tertentu kemudian dijual dan dibagi keuntungannya dan perjanjian dimana anak-anak ternakyang dilahirkan dijual dan keuntungannya dibagi

- a. Pada sistem bagihasil oleh MBC pembagian hasil yang diterapkan merupakan hasil dari kesepakatan bersama dengan pembagian hasil 60 %:40 %. Dimana pada pembagian tersebut peternak mendapatakan 60 % dari nilai sapi dan 40 % untuk MBC. Pembagian hasil MBC dapat dibagi ketika sapi yang dipelihara terjual. Penerimaan sapi yang yang terjualakan dikurangi dari harga sapi bakalan yang dipelihara peternak MBC untuk mendapatkan pendapatan kotoranya. Dari pendapatan kotor itulah yang akan dibagi 60 % untuk peternak dan 40 % untuk MBC. Hal ini sesuai pendapat Saragih (1997) bahwa tujuan system bagihasil pada hakekatnya adalah agar penggaduh mendapatkan keuntungan dari usaha menggaduh ternak,disamping itu penentuan jumlah pengembalian ternak gaduhan harus mampu mendorong peternak agar mampu mengembangkan usahanya secara swadaya.Secara tidak langsung sistem gaduhan bertujuan untuk menyebarluaskan dan melestarikan potensi peternak sapi potong, meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pedesaan disamping bertujuan menambah pendapatan peternak.
- b. Untuk pertanggungans resiko bagi peternak yang mengikuti sistem bagihasil MBC dapat diminimalisir misalnya jika ada ternak yang sakit dan segera dilaporkan maka akan ditangani langsung oleh pihak MBC begitupun jika ada ternak sapi yang mati dan peternak sudah melaporkan segera pada pihak MBC maka peternak tidak mengganti rugi ternak tersebut, hal ini sesuai pendapat Scheltema (1985) yaitu kecuali syarat pembagian, dalam bagi usaha ternak yang paling penting adalah arti ekonomisnya,bagaimana

pengaturannya dan siapa yang menanggung resiko bila terjadi kematian, pencurian dan kehilangan, dalam hal ini juga terdapat banyak variasi. Jika timbul resiko dalam system bagi hasil maka yang menanggung biaya kerugian adalah pemilik sapi. Sementara pemelihara sapi tidak dikenakan biaya apapun karena resiko yang ditimbulkan bukan dikarenakan unsur kesengajaan. Namun jika resiko yang muncul mengakibatkan kerugian dan adanya faktor kesengajaan dan keteledoran dari pemelihara sapi, maka pemelihara berkewajiban mengganti kerugian dari harga sapi keseluruhan atau setengah dari biaya harga sapi. Cara penyelesaian permasalahan yang timbul diselesaikan dengan jalan musyawarah keluarga diantara dua belah pihak. Hal ini dikarenakan ada beberapa faktor penyebab mengapa permasalahan yang timbul tidak diselesaikan ke jalur pengadilan yaitu (Sanjaya dan Sudarwati, 2015) :

- a. Pengakuan akan keberadaan hukum karma yaitu tuhan yang akan membalas perbuatan yang tidak baik kepada pemelihara jika bermain curang
- b. Adanya perasaan kasihan
- c. Adanya hubungan dekat seperti kerabat, saudara, tetangga sehingga tidak tega mengingat kebaikan mereka selama ini.

Kehadiran kelembagaan bagi hasil memberikan kesempatan bagi pemelihara untuk dapat mengoptimalkan sumberdaya yang dimilikinya sehingga memperoleh tambahan pendapatan. Kelembagaan bagi hasil antar pemelihara dengan pemodal sudah berlangsung sejak lama. Umumnya variasi pembagian yang diterima pemelihara (sesuai kesepakatan sebelumnya). Variasi itu dapat berdasar kepada : (1) persentase dari nilai penggemukan setelah dikurangi nilai awal atau harga bakalan. Pembagian ini bervariasi dan berkisar antar 60-70%; (2) berdasarkan kenaikan bobot badan yang dikonversikan berdasarkan harga pasar local (Nono, 2011).

- c. Pada penyediaan pakan oleh MBC untuk kelompok ternak. Peternak dapat mengambil hendaknya pembelian bakalan sebaiknya langsung ditangani peternak penggaduh (sebagai anggota kelompok atau lembaga tertentu). Tujuannya untuk meminimalisir sejumlah free rider pada tahap tersebut. Jadi hendaknya dilengkapi dengan syarat kecukupan adalah pemelihara wajib bergabung dalam lembaga tertentu antara lain koperasi. Lembaga tersebut diharapkan dapat dijadikan basis untuk ; (1) meningkatkan kapasitas pengelolaan usaha pemelihara sehingga memiliki peluang/potensi yang lebih baik dalam berhubungan dengan pasar (output/input); (2) akses terhadap permodalan dan teknologi. Dengan kata lain, kehadiran lembaga tersebut berpeluang besar berdampak

pada peningkatan produktivitas, peningkatan keadilan pembagian, dan kecepatan/ketepatan merespon pasar (dapat mengontrol pasar) serta menurunkan biaya langsung rumput gajah dilahan yang telah disediakan oleh MBC akan tetapi sebagai gantinya peternak membayar dengan tenaga dalam membantu MBC

- d. Sistem kerjasama yang dilakukan yaitu kesepakatan dilakukan secara tertulis. Persyaratan yang dibuat oleh MBC disahkan secara tertulis agar peternak mengetahui hak dan kewajibannya dalam menjalankan usahanya sehingga terjalin kepercayaan antara pihak MBC dan peternak sapi potong yang mengikuti sistem bagihasil

KESIMPULAN

Karakteristik peternak yang mengikuti sistem bagihasil dengan MBC sebahagian besar produktif, jenis kelamin pria, pendidikan sebahagian besar tingkat SMP dan jumlah anggota keluarga 5-6 orang. Sistem bagi hasil yang diterapkan yaitu terdiri dari sistem pembelian sapi, sistem bagihasil, pertanggungans resiko, penyediaan pakan dan perjanjian kerjasama

SARAN

Sebaiknya sistem bagihasil dilakukan pada usaha penggemukan dengan periode 3 bulan agar keuntungan juga dapat diperoleh lebih cepat oleh peternak dan pihak MBC. Kriteria peternak untuk mengikuti sistem bagihasil agar lebih diperjelas pada kontrak

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dirjen Dikti melalui Universitas Hasanuddin yang memberikan bantuan penelitian pada skim Penelitian dasar unggulan perguruan tinggi

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. 2002. Penggemukan Sapi Potong. PT. Agro Media Pustaka, Jakarta
- Ansar. 2014. Faktor-Faktor yang mempengaruhi kemudahan pemeliharaan ternak kambing kacang dengan sistem semi intensif di desa Borongtala kec. Tamalate. Kab. Jeneponto. Skripsi. Jurusan Sosial Ekonomi. Fakultas Peternakan UNHAS
- B. Grosh. 1994. Contract Farming in Africa: an Application of the New Institutional Economics. *J Afr Econ.* 3 (2):231-261
- Daniel, 2004. Pengantar Ekonomi Pertanian. PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Handayani, S. Gayatri dan B. Mulyatno, S. 2005. Family Labour Income on Cattle Farming in Toroh Sub district Grobogan Regency. *Mediagro.* 1(2), pp:38-44
- Haque, T. 2000. Contractual arrangement in land and labour markets in rural India. *Indian Journal of Agricultural Economics*, 55(3):233-252
- Hasbullah, J. 2006. Social capital (menuju keunggulan budaya manusia Indonesia). Jakarta: MR-United Press.
- M. J. Matatula, 2010. Analisis Finansial Usaha Peternakan Sapi Potong Pola Gaduhan di Kecamatan Kairatu, Kabupaten Seram Bagian Barat. *Jurnal Agroforestri*, V(3). pp-187-191
- Mahmud, A. 2013. Analisis daya saing dan strategi pengembangan peternakan sapi potong di propinsi Sulawesi selatan. Disertasi. Institut Pertanian Bogor.
- Mubyarto. 1986. Pengantar ekonomi pertanian. Lembaga penelitian, pendidikan dan penerapan ekonomi. Jakarta
- Murwanto, A. G. 2008. Karakteristik peternak dan tingkat masukan teknologi peternakan sapi potong di lembah prafi kabupaten Manokwari. *Jurnal Ilmu Peternakan*, 3(1), pp :8-15
- Natasukarya, AM, Wahyuni, S. Rahmawati. S... Suparyanto, A. Sukarsih. 1993. Peranan Wanita dalam sistem usaha tani ternak. Prosiding Pengolahan dan Komunikasi Hasil-Hasil Penelitian Peternakan di perdesaan. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan; pp:55-61
- Nono, O. H. 2011. Dampak kelembagaan bagi hasil terhadap kinerja usaha penggemukan sapi potong di kabupaten Kupang. *13(1): 28-38.*
- R. S. Tripathi, R. Singh and S. Singh, 2005. Contract Farming in Potato Production: An Alternative for Managing Risk and Uncertainty. *Agricultural Economics Research Review*. Vol. 18 (conference); pp 47-60.

- S.N.Sirajuddin, M.Aminawar, S.Nurlaelah, A.Amrawaty. 2015. The Application of Tesang Sharing System at Cattle Farm in Indonesia. Proceeding. The Third International Seminar on Animal Industry.Sustainable Animal Production for Better Human Welfare and Enviroment.Faculty of Animal Science.Bogor Agriculture University.pp.400-420
- S.N.Sirajuddin, M.Aminawar, S.Nurlaelah, A.Amrawaty.2016. Income Analysis of Beef Cattle Breeders for Traditional Profit-Sharing System,Tesang in South Sulawesi Province. Conference Proceeeding, Vienna-Austria June 16-17,18(6):1539-1542.
- Sanjaya, S dan L. Sudarwati. 2015. Modal sosial system bagi hasil dalam beternak sapi pada masyarakat desa purwosari atas, kecamatan dolok batu nanggar kabupaten simalungun. Vol 3. No.1
- Sirajuddin..2014. Strategi Penguatan Kelembagaan usaha sapi potong sistem Tesang di Propinsi Sulawesi Selatan.Laporan Penelitian LPPM UNHAS
- Soekartawi.1995.Agribisnis, Teori dan Aplikasinya.PT.Gajah Grafindo Persada,Jakarta
- Suratiyah,K. 2009. Ilmu Usaha Tani. Penebar Swadaya, Jakarta
- Tawaf, R.. 2002.Analisis Kelayakan Usaha Kemitraan Sapi Potong, Sapi Perah dan Ayam Ras. Fapet Unpad dan Dinas Peternakan Propinsi Jawa Barat.Bandung.
- W.Roesalli,E.Prasetyo,S.Marzuki,Oktarian. 2005.Pengaruh Teknologi Terhadap Produktivitas dan Pendapatan Peternak Sapi Potong di desa Canden, kecamatan Jetis, kabupaten Bantul.Seminar Nasional Peternakan dan Veteriner,,hal : 545-550